

S O L U S I

Vol. 11 No. 3 / Juli 2012

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi yang Belum Mengambil Matakuliah Auditing dan yang Sudah Mengambil Matakuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S-1 Perguruan Tinggi di Semarang)
Haniyo Adi Wibowo, Ardiani Ika S

Epistemologi dalam Kehidupan Bermasyarakat
Elizabeth Lucky Maretha S.

Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah)
Solichatun, Tri Endang Yani

Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)
Lilis Siti Badriah, Dijan Rahajuni

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Kompensasi dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening dalam Investasi Bertahap : Studi Eksperimen
Desrir Miftai, Andi Irfan

Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dalam Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah)
Hj. Widhy Setyowati, Hesty Ningtyas

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Bambang Sudyatno, Y. Willy Ciptadi A.

Rasio Keuangan dan Peringkat Obligas
Ida Nurhayati

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang
Maryono

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006 - 2009
Melinda P, Febrina Nafasati P.

S O L U S I

**Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis
Terbitan 3 bulan sekali
(Januari, April, Juli, Oktober)**

**Penerbit :
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Pelindung :
Rektor Universitas Semarang**

**Penanggungjawab :
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Dewan Redaksi :
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE., ME. (USM)
Prof. Dr. Imam Ghozali, M Com., Hons., Akt. (UNDIP)
Prof. Supramono, SE., MBA., DBA (UKSW)
Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME., M Kom. (UNISRI)
Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE., MM. (USM)**

**Redaktur Pelaksana :
Andy Kridasusila, SE., MM.
Dr. Ardiani Ika S., SE., MM., Akt.
Adijati Utaminingsih, SE., MM.**

**Sekretaris Pelaksana :
Abdul Karim, SE., MSi., Akt.
Susanto, SE., MM.**

**Tata Usaha :
Ali Arifin**

**Alamat Penerbit/Redaksi :
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272
Semarang - 50196**

Terbit Pertama kali : Juli 2002

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam. wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintah Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

DAFTAR ISI

	Hal.
1	1 – 15
Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi yang Belum Mengambil Matakuliah Auditing dan yang Sudah Mengambil Matakuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S-1 Perguruan Tinggi di Semarang) <i>Hanityo Adi Wibowo, Ardiani Ika S</i>	
2	16 - 24
Epistimologi dalam Kehidupan Bermasyarakat <i>Elizabeth Lucky Maretha S.</i>	
3	25 - 34
Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah) <i>Solichatun, Tri Endang Yani</i>	
4	35 - 47
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja) <i>Lilis Siti Badriah. Dijan Rahajuni</i>	
5	48 - 62
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Kompensasi dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening dalam Investasi Bertahap : Studi Eksperimen <i>Desri Miftah, Andi Irfan</i>	
6	63 - 85
Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dalam Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah) <i>Hj. Widhy Setyowati, Hesty Ningtyas</i>	
7	86 - 103
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia <i>Bambang Sudiyatno, Y. Willy Ciptadi A.</i>	
8	104 - 123
Rasio Keuangan dan Peringkat Obligasi <i>Ida Nurhayati</i>	
9	124 – 146
Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang <i>Maryono</i>	
10	147 – 156
Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006 – 2009 <i>Melinda P, Febrina Nafasati P.</i>	

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

OLEH :
MARYONO, SE. AKP. MM. AK.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampel penelitian yang digunakan adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah Kota Semarang digunakan tiga indikator yang meliputi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, dan Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Simpulan dari penelitian ini adalah : satu, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang senantiasa mengalami kenaikan; dua : Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang masing relative rendah dimana proporsi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Kota Semarang hanya sekitar 20 persen; tiga : Elastisitas Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terhadap Produk Domestik Regional Bruto relative rendah yaitu kurang dari 1 (satu).

Kata Kunci

Kemampuan Keuangan Daerah, Pertumbuhan PAD, Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan, Elastisitas PAD terhadap PDRB

FINANCIAL PERFORMANCE CITY SEMARANG

BY:

Maryono, SE. AKP. MM. AK

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial capacity of Semarang area. This is consistent with the spirit of regional autonomy which aims to improve local capacity to manage local resources in order to improve the welfare of society.

The samples used in this research is realisasi Revenue and Expenditure of Semarang from 2005 until 2009. To measure financial capability Semarang City used three indicators which include Revenue Growth, Revenue Contribution to Total Revenue, and Elasticity Revenue Gross Regional Domestic Product.

The conclusions of this study are: single, from 2005 to 2009 Revenue of Semarang continues to increase; twofold: Financial Independence Semarang city in which the proportion of each is relatively low compared with the Revenue Total Revenue of Semarang sekitas only 20 percent; three: elasticity Revenue of Semarang to the Gross Domestic Product is relatively low at less than 1.

Keyword

Financial capability, revenue growth, revenue contribution to the chips Revenue, revenue elasticity to GDP

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

Oleh : Maryono, SE., AKP., MM., AK.

I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebeiumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*). Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional (*line-item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002 sebagai penjabaran dari UU No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan perubahan dan perkembangan yang terjadi maka peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006. Perubahan peraturan ini dimaksudkan agar dapat kelemahan-kelemahan para peraturan sebelumnya dapat dihindari dan dapat mengakomodasi kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa

sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah

Lahirnya Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tentu saja juga akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-undang tersebut memuat jenis dan retribusi daerah serta batas tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

1.1. RUMUSAN MASALAH

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari Total Penerimaan Daerah seharusnya mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini mengingat bahwa beban daerah otonom yang semakin meningkat pula dari tahun ke tahun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengindikasikan adanya sumber pendapatan asli daerah yang memang potensial serta menunjukkan adanya usaha pemerintah setempat dalam menggali potensi daerah melalui berbagai kebijakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi desentralisasi.

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah menunjukkan derajat kemandirian daerah otonom dalam membiayai pengeluarannya. Semakin besar persentase Penerimaan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri. Sebaliknya bila persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan ketidak mandirian daerah dalam memenuhi kebutuhannya.

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto merupakan perbandingan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Semakin besar elastisitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Bila sebaliknya dimana elastisitas rendah maka berarti pemerintah daerah tidak mampu memanfaatkan pertumbuhan perekonomian daerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah kota dan kabupaten terdiri dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik secara nominal maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang ?
2. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Semarang?

3. Bagaimana elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang?
4. Bagaimana pertumbuhan dan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang?

II. TELAAH PUSTAKA

2.1. KERANGKA TEORITIS

2.2.1. DEFINISI OTONOMI DAERAH

Berikut ini disampaikan beberapa definisi otonomi daerah :

- a. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
(Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4).

- b. Menurut kamus *Webster's Third New International Dictionary*

Kata *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata *autonomia*, yang artinya :

The quality or state being independent, free, and self directing. Atau The degree of self determination or political control possessed by a minority group, territorial division or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence.

(Saragih, 2003: 39 dan 40).

- c. Menurut *Encyclopedia of Social Science*

Dalam pengertiannya yang orisinal, otonomi adalah *The legal self sufficiency of social body and its actual independence* (Yani, 2002: 5).

- d. Menurut *Black's Law Dictionary*

Definisikan *autonomy* adalah *The political independence of a nation, the right (and condition) of power of self government. The negation of a state of political influence from without or from foreign powers* (Ibid: 5).

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Saragih, Op cit: 83). Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang

dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

2.1.2. DEFINISI DESENTRALISASI

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8,

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4 dan 220)

2.1.3. DEFINISI DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, Op cit: 83)

2.1.4. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004: 24).

Untuk melihat kinerja keuangan daerah, dapat dilakukan dengan menganalisis

- a. Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)
- b. Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*)
- c. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*)
- d. Upaya fiskal (*tax effort*)
 1. Derajat desentralisasi Fiskal
Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat (Ibid: 27)
 2. Kebutuhan fiskal
Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1,
“Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.” (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 236).
 3. Kapasitas fiskal

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, " Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil." (Ibid: 236).

4. Upaya Fiskal
Upaya fiskal adalah koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
5. Kebutuhan Fiskal Standar (SKF)
Kebutuhan fiskal standar adalah rata-rata kebutuhan fiskal standar suatu daerah (Halim, 2004: 29)
6. Kapasitas Fiskal Standar (KFs)
Kapasitas Fiskal Standar (KFs) adalah rata-rata kapasitas fiskal standar suatu daerah (Ibid: 29)
7. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin lemah pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).
8. Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PHPBP), maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya).
9. Semakin tinggi Sumbangan Daerah (SB) maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Sumbangan Daerah (SB) maka semakin kuat derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).
10. Semakin tinggi Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP), maka semakin besar pula kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Semakin rendah Indeks Pelayanan Publik (IPPF), semakin sedikit pula kebutuhan fiskal (*fiscal need*)
11. Semakin elastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut semakin baik. Semakin inelastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut semakin buruk.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

2.2.1. Sudono Susanto

Penelitian ini berjudul "*Analisis Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah (studi kasus Daerah Tingkat II Banjarnegara)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat otonomi fiskal (DOF) di Daerah Tingkat II Banjarnegara yang diukur dengan variabel tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (G).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (G) berpengaruh negatif terhadap derajat otonomi fiskal daerah (DOF).

2.2.2. Yuliati

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (Halim, 2004: 21) yang berjudul "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Malang)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis derajat otonomi Kabupaten Malang yang ditekankan kepada derajat desentralisasi, bantuan, serta kapasitas fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketergantungan pemerintah Kabupaten Malang terhadap pemerintah pusat pada tahun anggaran 1995/1996-1999/2000 masih sangat tinggi, yang dibuktikan dengan masih rendahnya rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) selama kurun waktu 5 tahun, yaitu hanya sebesar 15%, walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) selama kurun waktu 5 tahun hanya sebesar 29% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat terhadap keuangan daerah Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 tahun tersebut masih sangat besar yang juga ditunjukkan dengan tingginya rata-rata proporsi pemerintah pusat terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), yaitu sebesar 71%. Kabupaten Malang memiliki kapasitas fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan standar fiskal rata-rata kabupaten/kota se-Jawa Timur. Namun apabila dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya maka terdapat kekurangan (gap) sebesar 12%. Jadi, untuk menutupi kekurangan tersebut memang masih diperlukan dana dari pemerintah pusat.

2.2.3. Jasagung Hariyadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jasagung Hariyadi (Halim, 2004: 339) yang berjudul "*Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung: Studi Kasus Tahun Anggaran 2001.*" Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui estimasi penerimaan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pengukuran derajat desentralisasi fiskal untuk tahun 2001, sehingga terlihat kemampuan Kabupaten Belitung dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang mulai berlaku efektif pada tahun 2001. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan estimasi APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2001 perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 11,61%. Sedangkan perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah

sebesar 7,18% dan Sumbangan Daerah dan Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 81,21%.

2.2.4. Kifliansyah

Penelitian yang dilakukan oleh Kifliansyah (Halim, 2004: 329) yang berjudul "*Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*." Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 1999/2000. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 3,21%, proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 18,80%, proporsi Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 76,61%. Dengan kondisi ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.

2.2.5. Lilies Setiarti

Penelitian yang dilakukan oleh Lilies Setiarti (Jurnal, 2002: 141-152) yang berjudul "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Kabupaten Bantul Yogyakarta)*". Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur serta menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah dan mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Struktur Penerimaan APBD Kabupaten Bantul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, berdasarkan kesiapan pemerintah kabupaten bantul dari sisi keuangan daerah dapat disimpulkan

1. Derajat Desentralisasi Fiskal yang dihitung atas dasar rasio antara PAD terhadap TPD, rasio BHPBP terhadap TPD, rasio SE terhadap TPD, menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.
2. Bila dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja PEMDA masih mengindikasikan adanya ketergantungan dari pemerintah pusat.
3. Kabupaten Bantul memiliki kapasitas fiskal yang sama besar, sehingga tidak perlu menutup dengan bantuan pemerintah pusat.
4. Posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB, menunjukkan hasil yang berbeda berdasarkan atas PDRB harga konstan dengan PDRB atas harga berlaku. Namun demikian sumbangan PDRB terhadap PAD sangat strategis peranannya.

Kedua, berdasarkan kesiapan pemerintah dari segi kemampuan keuangan daerah masih kurang (terutama aspek desentralisasi fiskal) sehingga perlu

diupayakan peningkatan PAD baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi.

III. METODE PENELITIAN

3.1. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Semarang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009..

3.2. METODE ANALISIS DATA

a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = (\text{PADt} - \text{PADt-1}) / \text{PADt-1}$$

Dimana :

PADt = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t-1

b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PAD} = \text{PADt} / \text{TPDt}$$

Dimana :

PADt = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah pada tahun t

c. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengukur elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto digunakan rumus :

$$\text{Elastisitas PAD} = (\text{PADt} - \text{PADt-1}) / (\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})$$

Dimana :

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun t

PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun t-1

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun t-1

d. Pertumbuhan dan Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengukur pertumbuhan dan kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan analisis Cammon

Size baik secara horizontal untuk mengukur pertumbuhannya maupun secara vertikal untuk mengukur kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA SEMARANG

4.4.1. ASPEK GEOGRAFI, GEOLOGI, HYDROLOGI & KLIMATOLOGI

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Data wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050' – 7010' Lintang Selatan dan garis 109035' – 110050' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota

yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu

Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis keierengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonopluombon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara lengkap ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0 persen sampai 40 persen (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348.00 mdpl.

Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang - Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg). Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.

Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan – keiurusan dan kontak batuan yang tegas yang merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga barat laut - tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang berumur kuartar dan tersier.

Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur.

4.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009

sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan. Penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding penduduk pindah dan penduduk yang mati.

Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan penduduk usia produktif (umur 15 – 65 tahun) dan 26,04% merupakan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah 22,86% telah tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% belum tamat SD, 20,28 % telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belum pernah sekolah, 4,51% telah tamat SO IV/S1/S2, dan 4,35% telah tamat DI/DII/DIII.

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa.

4.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut :

4.1.3.1. Ekonomi.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektorsektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku selama periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 26.624.244,17 sampai dengan tahun 2009 mencapai sebesar Rp. 39.429.568.000,-.

Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sector Industri Pengolahan dan sektor usaha bangunan. Pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB berimplikasi terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98 % pada tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang tercatat sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari 6,03 % pada tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurunan ini lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas (Asean-China Free Trade Area/ACFTA), kenaikan BBM dan TDL.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006 sebesar 6,08 %, tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesar 10,34 % dan tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasi yang terjadi lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok.

c. PDRB Perkapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2005-2009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2005 sebesar Rp. 14.947.472,59 pada tahun 2006 sebesar

Rp.17.067.350,89, pada tahun 2007 sebesar Rp.19.394.727,40, pada tahun 2008 sebesar Rp.21.352.860,09, dan tahun 2009 sebesar Rp.23.889.579,87.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 10.534.628,92,-, pada tahun 2006 sebesar Rp.11.045.072,76,-, pada tahun 2007 sebesar Rp.11.591.578,22, pada tahun 2008 sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 12.338.639,96. d. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**. IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pada tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota Surakarta, namun masih jauh diatas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Selengkapnya IPM Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

4.1.3.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. AMH tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesar 95,85 %, tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesar 99,30 % dan sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf sebesar 99,47 %. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 menjadi 96,51%. Angka Partisipasi Kasar

(APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2009 APK SD/MI mencapai 105,27 %, SMP/MTs 114,19, sedangkan SMA/SMA/MA mencapai 116,96 %. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM SD/MI pada tahun 2009 sebesar 89,68 %, SMP/MTs 79,01 %, SMA/SMK/MA sebesar 79,97 %. Capaian APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidikan telah berada di atas rata-rata APK/APM Jawa Tengah kecuali untuk SD/MI. Belum optimalnya angka capaian APK/APM disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan sudah melebihi 20 % dari total anggaran APBD. Oleh karena itu diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas.

b. Kesehatan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) kondisi pembangunan Kesehatan menunjukkan perubahan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi selama 5 tahun menurun dari 98,08 % pada tahun 2005 menjadi 81,40 % tahun 2009. Demikian pula Angka persentase gizi buruk mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 0,019 % menjadi 0,04 % tahun 2009. Penurunan angka kelangsungan hidup dan peningkatan angka gizi buruk lebih disebabkan adanya penyakit bawaan dan wabah penyakit yang disebabkan oleh vector binatang seperti Demam Berdarah.

Upaya pengembangan paradigma hidup sehat harus menjadi perhatian utama agar wabah penyakit menular tidak terulang. Namun demikian secara keseluruhan Angka Usia harapan Hidup Kota Semarang di Kota Semarang sebesar 72,1, jauh melebihi angka harapan hidup nasional sebesar 69,0 tahun.

c. Kemiskinan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) jumlah penduduk miskin mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tahun 2005- 2008 mengalami peningkatan peningkatan, tahun 2005 sebanyak 94.246 jiwa, tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 398.009 jiwa. Begitu pula ratio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin

meningkat selama 4 tahun terakhir (2005-2008), tahun 2007 sebesar 6,64%, tahun 2006 17,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin sebesar 6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan

kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan. Kedepan diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran masyarakat untuk turut serta dalam menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu didorong terus menerus.

d. Kepemilikan tanah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting.

e. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2005 sebesar 64,32 %, tahun 2006 sebesar 64,38%, tahun 2007 sebesar 88,61%, tahun 2008 sebesar 88,51%, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,70% atau menjadi sebesar 81,44%. Penurunan ratio penduduk yang bekerja lebih diakibatkan karena meningkatnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya perluasan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran.

4.2. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

4.2.1. PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dari data yang tersedia menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dari tahun 2005 hingga tahun 2009 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2005 PAD Kota Semarang Rp. 189.771.977.561,00 dan tahun 2009 PAD Kota Semarang menjadi Rp. 306.112.422.821,00. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu meningkat sebesar 18,47 % dari tahun sebelumnya tahun 2005. Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan 5,97 %, tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 meningkat 12,46 % sedangkan tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2008 mengalami peningkatan 14,26 %.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun tentu saja hal ini sangatlah menggembirakan karena dengan peningkatan ini memberikan dampak positif pada pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah Kota Semarang apabila meningkat maka Pendapatan Daerah juga meningkat. Peningkatan ini juga menunjukkan keberhasilan

pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki Kota Semarang sehingga menjadi pendapatan yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data yang menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dari tahun 2005 hingga 2009.

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2009

TAHUN	JUMLAH	PERUBAHAN	
2005	189.771.977.561.00		
2006	224.822.679.542.00	35.050.701.981.00	18.47%
2007	238.237.999.497.00	13.415.319.955.00	5.97%
2008	267.914.250.493.00	29.676.250.906.00	12.46%
2009	306.112.422.821.00	38.198.172.418.00	14.26%

4.2.2. KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN

DAERAH KOTA SEMARANG.

Bila dibandingkan dengan total pendapatan secara keseluruhan pemerintah daerah Kota Semarang, sumbangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 hingga 2009 berkisar 20 %. Tahun 2005 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kota Semarang 24,32 %, tahun 2006 kontribusinya 21,30 %, tahun 2007 sebesar 20,30%, tahun 2008 sebesar 20,03 % dan tahun 2009 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kota Semarang adalah sebesar 20,04 %.

Kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah Kota Semarang justru sebagian besar berasal dari sumber lain selain dari Pendapatan Asli Daerah yang mencapai sekitar 80 %. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berkisar 20 % juga menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kota Semarang yang masih rendah artinya apabila pemerintah daerah hanya mengandalkan pembiayaan dari PAD saja maka akan terjadi deficit dalam jumlah yang sangat besar.

Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah Kota Semarang dalam jangka panjang harus diupayakan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sehingga tingkat kemandirian dalam keuangan nantinya meningkat dan tidak tergantung lagi pada sumber pendapatan lain selain dari PAD. Namun demikian dalam upaya peningkatan PAD yang salah satu komponennya adalah pajak daerah tidak boleh tanpa mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakatnya dalam membayar

pajak. Berikut data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Kota Semarang tahun 2005 hingga tahun 2009.

Tabel 4.2
Kontribusi Penadapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Semarang

TAHUN	PAD	PENDAPATAN	%
2005	189,771,977,561.00	780,214,064,994.00	24.32%
2006	224,822,679,542.00	1,055,716,854,521.00	21.30%
2007	238,237,999,497.00	1,173,328,884,085.00	20.30%
2008	267,914,250,403.00	1,337,697,047,131.00	20.03%
2009	306,112,422,821.00	1,527,742,676,516.00	20.04%

4.2.3. ELASTISITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAS PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO.

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Prudok Domestik Regional Bruto mengukur tingkat perubahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang diakibatkan oleh perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Semakin besar elastisitas PAD atas PDRB menunjukkan kondisi yang baik dimana setiap perubahan atau peningkatan PDRB diikuti oleh perubahan atau peningkatan PAD. Artinya bahwa setiap peningkatan PDRB pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk usaha meningkatkan PAD.

Sebaliknya elastisitas yang rendah menunjukkan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peningkatan PDRB guna meningkatkan PAD. Elastisitas PAD atas PDRB tahun 2006 hingga tahun 2009 mengalami fluktuasi dari 1,25 pada tahun 2006 dan 1,26 pada tahun 2009. Namun demikian pada tahun 2007 dan tahun 2008 elastisitas PAD atas PDRB lebih rendah yaitu pada tahun 2007 elastisitasnya 0,41 dan tahun 2008 0,94. Elastisitas PAD atas PDRB Kota Semarang menunjukkan angka yang rendah yang menunjukkan bahwa perubahan PDRB yang terjadi di Kota Semarang tidak diimbangi dengan peningkatan PAD secara proporsional..

Tabel 4.3
Elastisitas PAD atas PDRB Kota Semarang

TAHUN	PAD	Perubahan	PDRB	Perubahan	Elastisitas
2005	189,771,977,561.00		23,208,224.00		
2006	224,822,679,542.00	0.18	26,624,244.00	0.15	1.25
2007	238,237,999,497.00	0.06	30,515,737.00	0.15	0.41
2008	267,914,250,403.00	0.12	34,540,949.00	0.13	0.94
2009	306,112,422,821.00	0.14	38,459,815.00	0.11	1.26

4.2.4. SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, penerimaan Retribusi Daerah, penerimaan Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. /Dari keseluruhan komponen PAD tersebut pajak daerah mendominasi sumber PAD dari tahun 2005 hingga tahun 2009 yang secara perentase senantiasa berada di atas 50 %. Secara umum sumber pendapatan PAD dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami kenaikan di semua aspek, meskipun persentase kenaikannya beragam dari tahun ke tahun.

Penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah menempati urutan kedua setelah Pajak Daerah dalam penerimaan asli daerah kota Semarang yang berkisar 30 %. Namun demikian pada tahun 2009 persentase retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup tinggi hingga mencapai hanya sekitar 22 %. Sementara hasil dari Pengelolaan Daerah yang dipisahkan sumbangannya terhadap PAD Kota Semarang berkisar 1 hingga 5 % setiap tahunnya. Pendapatan lain-lain yang sah memberikan sumbangan pendapatan bagi PAD Kota Semarang sekitar 15 % setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 24 % dari PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan lain-lain yang sah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan pemerintah Kota Semarang yang diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini ditunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dari tahun 2005 hingga tahun 2009 selalu mengalami kenaikan dalam jumlahnya. Kondisi ini tentu saja cukup baik karena dengan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan meningkatkan pula kemampuan pembiayaan pemerintah daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang.
2. Kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Semarang diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Total pemerintah Kota Semarang dari tahun 2005 hingga tahun 2009 menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sekitar 20 %. Dengan sumbangan PAD yang hanya 20 % ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Semarang masih harus mengandalkan sumber pendapatan lain dengan jumlah yang lebih besar yaitu yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lain.
3. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang menunjukkan angka yang cukup rendah dimana dari tahun 2005 hingga tahun 2009 rata-rata kurang dari angka 1. Artinya bahwa peningkatan PDRB yang terjadi di Kota Semarang tidak dapat diikuti secara proporsional dalam peningkatan PADnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak setiap adanya peningkatan PDRB pemerintah daerah Kota Semarang belum mampu memanfaatkan bagi kepentingan PAD.
 4. Sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dari tahun ke tahun masih didominasi oleh penerimaan Pajak Daerah dimana dari tahun 2005 hingga 2009 memberikan sumbangan pendapatan di atas 50 %. Retribusi Daerah memberikan sumbangan dengan urutan kedua setelah Pajak Daerah dari tahun 2005 hingga tahun 2008 dengan rata-rata persentase 30 %. Namun tahun 2009 Retribusi Daerah mengalami penurunan hingga menjadi 22 %. Urutan ketiga sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah yang persentasenya sekitar 15 %. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang terakhir adalah Pengelolaan Daerah yang dipisahkan yang memberikan sumbangan berkisar kurang dari 5 %.

5.2. SARAN

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Semarang dapat menempuh beberapa kebijakan yang antara lain :

1. Intensifikasi penerimaan pendapatan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lain yang syah melalui peningkatan efektifitas dengan meningkatkan kinerja satuan kerja terkait.
2. Ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui peningkatan dan perluasan sumber pajak daerah, retribusi daerah, maupun pendapatan asli daerah lain yang syah dengan meningkatkan kinerja pelayanan sehingga akan mendorong peningkatan investasi di kaerah Kote Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah.
- Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiarti, L. (2002), "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : studi di kabupaten Bantul Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume III, No. 2, 141-152.
- Shah, Anwar (1994), " Intergovernmental Fiscal Relation in Indonesia ". *World Bank Discussion Paper No 239*. The World Bank Washington DC, dari www.worldbank.org.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1999), *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.